



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PENGANGGURAN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**Fieka Nurul Arifa**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[fieka.arifa@dpr.go.id](mailto:fieka.arifa@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pengangguran di Indonesia telah menjadi isu krusial, terutama di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Meski SMK dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan kerja praktis, kenyataannya, lulusan SMK justru mengalami tingkat pengangguran yang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Agustus 2024, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang atau 4,91 persen dari total angkatan kerja. BPS juga mencatat dari jumlah tersebut, lulusan SMK mendominasi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,62 persen, diikuti oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan TPT 6,73 persen. Lulusan sekolah menengah pertama (SMP) memiliki TPT 4,28 persen, sementara lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah mencatat TPT 2,38 persen. Lulusan pendidikan tinggi, yaitu Diploma I/II/III, TPT tercatat sebesar 4,87 persen, dan lulusan Diploma IV/S-1/S-2/S-3 memiliki TPT 5,63 persen.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK antara lain: *pertama*, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Industri. Meskipun pendidikan SMK menekankan keterampilan praktis, banyak perusahaan merasa bahwa keterampilan yang dimiliki lulusan SMK belum memenuhi standar industri. Di samping itu, keterbatasan akses ke pendidikan tinggi mempersempit kesempatan lulusan SMK untuk mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan industri. Pendidikan vokasi di tingkat menengah seharusnya menjadi awal dari pembelajaran berkelanjutan, tetapi banyak lulusan SMK yang tidak memiliki kesempatan atau dana untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi memperburuk situasi mereka di pasar kerja. Di mana lulusan SMK tetap berada di lapisan bawah pasar kerja tanpa keterampilan yang berkembang seiring kemajuan teknologi.

*Kedua*, minimnya program magang yang terstruktur. Program magang yang seharusnya memberikan pengalaman kerja nyata sering kali belum dijalankan secara efektif. Magang ini penting untuk memperkenalkan siswa pada lingkungan kerja yang sesungguhnya dan meningkatkan daya saing mereka saat mencari pekerjaan. Dalam banyak kasus, lulusan SMK berakhir dengan pengalaman kerja terbatas sehingga sulit bersaing dengan lulusan dari jenjang pendidikan lain. *Ketiga*, kurangnya *soft skills* dan kesiapan kerja. Selain keterampilan teknis, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki *soft skills*, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Namun, kurikulum SMK di Indonesia umumnya lebih fokus pada keterampilan teknis daripada pengembangan *soft skills*, sehingga lulusan SMK kurang siap menghadapi dinamika dunia kerja yang sesungguhnya.

Tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK berdampak luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut di antaranya penurunan produktivitas ekonomi, masalah sosial, dan kesehatan mental. Ketika lulusan SMK yang seharusnya produktif tidak bekerja, hal ini berdampak pada produktivitas nasional dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, situasi ini juga bisa meningkatkan beban pada program bantuan sosial pemerintah. Di sisi lain, pengangguran sering dikaitkan dengan berbagai masalah sosial, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas. Selain itu, pengangguran dapat memengaruhi kesehatan mental individu yang bersangkutan, dengan menimbulkan perasaan rendah diri dan stres.

Untuk menurunkan angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, beberapa langkah dapat diambil, antara lain: *pertama*, peningkatan kerja sama antara SMK dan industri. Peningkatan kerja sama antara sekolah dan industri perlu dilakukan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini termasuk memperbarui materi pelajaran sesuai dengan teknologi terbaru dan kebutuhan spesifik industri. *Kedua*, peningkatan program magang dan sertifikasi kompetensi. Menyediakan program magang yang terstruktur dan mengintegrasikan sertifikasi kompetensi dapat membantu siswa mendapatkan pengalaman kerja nyata serta meningkatkan kredibilitas mereka di pasar tenaga kerja. *Ketiga*, penguatan pembelajaran *soft skills* di SMK. Kurikulum SMK perlu diperluas dengan pembelajaran *soft skills*, meliputi kemampuan komunikasi, kerja sama, dan keterampilan manajemen diri. Dengan *soft skills* yang lebih baik, lulusan SMK akan lebih siap menghadapi tantangan kerja dan mampu beradaptasi di berbagai situasi kerja.

## Atensi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Khususnya Komisi X memiliki beberapa peran dalam mengatasi pengangguran lulusan SMK di antaranya: *pertama*, mendorong legislasi yang mendukung pendidikan vokasi misalnya dengan memperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pendidikan vokasi. *Kedua*, pengawasan implementasi kebijakan pemerintah untuk memastikan bahwa program-program pemerintah, seperti revitalisasi SMK dan peningkatan program magang industri, berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran. *Ketiga*, penganggaran untuk program peningkatan keterampilan termasuk alokasi untuk pendidikan vokasi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, seperti laboratorium dan fasilitas praktik yang mendukung keterampilan teknis. Selain itu juga dapat mengusulkan penambahan anggaran untuk program beasiswa yang difokuskan pada lulusan SMK yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. *Keempat*, memfasilitasi kerja sama dengan industri melalui kebijakan atau insentif. Hal ini termasuk mendorong industri untuk lebih terlibat dalam program pendidikan vokasi melalui kerja sama dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, serta menyediakan kesempatan magang atau rekrutmen lulusan SMK. *Kelima*, promosi program pelatihan termasuk peningkatan *soft skill* dan sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK agar mereka memiliki pengakuan keterampilan yang diakui secara nasional maupun internasional. Program sertifikasi ini diharapkan akan membuat lulusan SMK lebih kompetitif di pasar kerja, baik dalam negeri maupun global.

## Sumber

antaranews.com, 5 November 2024;  
Badan Pusat Statistik, 2024;  
detik.com, 6 November 2024;  
jpnn.com, 9 November 2024; dan  
koranindopos.com, 6 November 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyanti

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

## Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2024